

## Evaluasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran oleh Pemerintah Kecamatan

**M. Harry Mulya Zein**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

[harry.zein@ipdn.ac.id](mailto:harry.zein@ipdn.ac.id)

**Sisca Septiani**

Universitas Negeri Semarang

[siscaseptiani1@students.unnes.ac.id](mailto:siscaseptiani1@students.unnes.ac.id)

Korespondensi penulis: [harry.zein@ipdn.ac.id](mailto:harry.zein@ipdn.ac.id)

**Abstract.** *This study evaluates the quality of local government public services in fire disaster management. Using a descriptive qualitative approach, this study focuses on interviews, observation, and documentation techniques for data analysis. The results identified a shortage of firefighting equipment and a significant reliance on the sub-district as the primary coordinator with the DPKPB. Despite rapid response efforts from the subdistrict government, more public education on fire prevention and handling still needs to be done. The main challenges are inhibiting factors such as natural conditions, lack of public awareness, and lack of infrastructure. This research suggests improved equipment provision, more effective community outreach, infrastructure development, and coordination between agencies and communities to quickly and efficiently respond to fire emergencies.*

**Keywords:** *public services, fire disasters*

**Abstrak.** Penelitian ini mengevaluasi kualitas layanan publik pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memfokuskan pada teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk analisis data. Hasilnya mengidentifikasi kekurangan peralatan pemadam kebakaran dan ketergantungan yang signifikan pada kecamatan sebagai koordinator utama dengan DPKPB. Meskipun ada upaya respons cepat dari pemerintah kecamatan, masih terdapat kekurangan dalam penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran. Faktor penghambat seperti kondisi alam, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kekurangan infrastruktur menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyarankan peningkatan penyediaan peralatan, penyuluhan masyarakat yang lebih efektif, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan koordinasi antar lembaga dan masyarakat untuk memastikan respons yang cepat dan efisien dalam menghadapi situasi darurat kebakaran.

**Kata kunci:** layanan publik, bencana kebakaran

### LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu

mengeluh dan kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. Ada sebagian masyarakat sampai saat ini masih menganggap rendah terhadap kinerja birokrasi.

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang makin ketat.

Kehadiran bencana merupakan kondisi yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun tetapi tidak ada seorangpun yang tahu tentang kehadirannya. Bencana selalu merugikan dan mengancam kehidupan manusia, potensi terjadinya bencana bisa terjadi kapan saja. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.

Kebakaran dapat disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor ulah manusia yang berakibat dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. (Arifin, 2020) (Nugraha, et al., 2020). Pemukiman padat dapat menjadi penyebab kebakaran (Andini, et al., 2020).

Kejadian bencana yang tidak dapat di prediksi, rendahnya tingkat pengetahuan di masyarakat terkait mitigasi bencana kebakaran permukiman dan memiliki dampak yang besar baik korban jiwa maupun kerugian materil lainnya (Muthmainnah, 2021). Masyarakat mempunyai peran yang penting dalam mencegah kebakaran (Arisandi, et al., 2020).

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bukan hanya pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab akan tetapi pemerintah daerah pun mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap masyarakatnya agar aman terhadap bencana yang bisa terjadi kapan saja.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan (*service quality*) telah menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (*Customer satisfaction*) (Rinaldi, 2012).

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan public (Bisri & Asmoro, 2019).

### **Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dapat mengungkap dan mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah peristiwa sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya. Lokasi Penelitian di Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta meliputi beberapa desa yang terjadi bencana.

Menurut Moleong (2014: 157) mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian

digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh. Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Kecamatan siaga bencana merupakan salah satu bentuk dari tanggungjawab sebagai tangan panjang dari pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi. Selama ini di Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta belum dibentuk tim tanggap bencana dan tidak ada pos wilayah pemadam kebakaran seperti di kecamatan lainnya di Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Campaka belum dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran padahal kejadian bencana kebakaran yang terjadi di Kecamatan Campaka sudah sangat sering terjadi. Berikut data terjadinya kebakaran di Kecamatan Campaka :

**Table 4.2 Data bencana kebakaran dari tahun 2017-2019 di Kecamatan Campaka**

Tahun	Desa Tempat Kejadian	Jumlah Kejadian
2017	Campaka	2
	Cirende	5
	Benteng	4
	Campakasari	4
	Cijaya	4
	Kertamukti	3
	Cimahi	1
	Cikumpay	2
	Cijunti	2
	Cisaat	1
	2018	Campaka
Cirende		6
Benteng		4
Campakasari		2
Cijaya		1
Kertamukti		1
Cimahi		2
Cikumpay		1
Cijunti		4
Cisaat		3
2019	Campaka	2
	Cirende	7
	Benteng	6
	Campakasari	2
	Cijaya	1

	Kertamukti	1
	Cimahi	1
	Cikumpay	1
	Cijunti	3
	Cisaat	2
	Total Kejadian	81

Sumber :Kecamatan Campaka

Dari tabel di atas terlihat ada 81 kejadian kebakaran di Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2017 dengan kejadian kebakaran sebanyak 28 kali bencana kebakaran, pada tahun 2018 dengan kejadian kebakaran sebanyak 25 kali dan tahun 2019 dengan kejadian bencana kebakaran sebanyak 26 kali.

Hasil penelitian kualitas pelayanan bencana kebakaran pada Kecamatan Campaka diuraikan sebagai berikut:

1. Bukti Langsung (Tangible):

- a. Kecamatan Campaka tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran sendiri.
- b. Masyarakat dan pihak kecamatan seringkali harus bertindak sendiri dengan alat seadanya saat terjadi kebakaran, sebelum kedatangan pemadam kebakaran.

2. Keandalan (Reliability):

- a. Masyarakat mengandalkan kecamatan sebagai pemerintah terdekat dalam kebakaran.
- b. Peran Kecamatan Campaka terutama adalah menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) untuk penanganan lebih lanjut.

3. Daya Tanggap (Responsiveness):

- a. Pemerintah Kecamatan Campaka berusaha memberikan himbauan dan membantu penanganan kebakaran.
- b. Pihak kecamatan juga berupaya memastikan bahwa pemadam kebakaran dapat mencapai lokasi bencana dengan lancar.

4. Jaminan (Assurance):

- a. Rekonstruksi pasca bencana kebakaran menjadi tugas dari BPBD Kabupaten Purwakarta.
- b. Kecamatan Campaka berperan dalam memfasilitasi dan memberikan bantuan darurat kepada korban.

5. Kepedulian/Empati (Empathy):

- a. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana kebakaran berupa sembako dan keperluan dasar lainnya.

Prosedur Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran:

1. Prosedur Penanggulangan Bencana Kebakaran:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta mengatur tanggung jawab pemilik gedung dan kendaraan dalam kesiapan penanggulangan kebakaran.
- b. Tindakan awal penyelamatan, pemadaman, dan pengamanan lokasi bencana ditetapkan dalam prosedur.

2. Partisipasi Masyarakat:

- a. Masyarakat Kecamatan Campaka aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kebakaran.
- b. Terdapat inisiatif masyarakat dalam melaporkan dan membantu pemadaman kebakaran sebelum kedatangan petugas.

3. Keterlibatan Dinas dan Instansi Terkait:

- a. Tugas koordinasi penanggulangan bencana kebakaran dikoordinasikan oleh Dinas terkait.
- b. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cepat tanggap dalam menghubungi pemadam kebakaran.

4. Manajemen Resiko Bencana:

- a. Pembangunan sistem penanggulangan bencana (Disaster Management Plan) termasuk legitimasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan peningkatan kapasitas.
- b. Masyarakat diajak untuk aktif dalam pencegahan, pengawasan, dan pelaporan terkait kebakaran.

5. Kekurangan dalam Penyuluhan:

- a. Tidak adanya penyuluhan bencana kebakaran yang cukup bagi masyarakat, meskipun peristiwa kebakaran sering terjadi.
- b. Peraturan Daerah memandatkan pelatihan pemadaman kebakaran yang belum terlaksana secara optimal.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Bencana Kebakaran:

1. Faktor Pendukung:

- a. Pembentukan BPBD: Terbentuknya BPBD Kabupaten Purwakarta, yang membuka peluang untuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana di tingkat kecamatan.
- b. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana kebakaran.
- c. Dukungan Pemerintah: Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan dukungan dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran.

2. Faktor Penghambat:

- a. Faktor Alam: Kesulitan dalam pengendalian kebakaran di wilayah hutan dan lahan, termasuk akses ke sumber air.
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, terutama dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan.
- c. Kekurangan Sarana dan Prasarana: Tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk evakuasi dan pertolongan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- d. Kurangnya Penyuluhan: Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya kebakaran.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian tentang kualitas pelayanan bencana kebakaran di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta menunjukkan berbagai aspek yang signifikan dalam penanganan bencana. Dalam hal bukti langsung atau tangible, terdapat kekurangan peralatan pemadam kebakaran di Kecamatan Campaka, yang menyebabkan masyarakat dan pihak kecamatan sering kali harus bertindak sendiri dengan alat seadanya saat terjadi kebakaran. Ketergantungan masyarakat terhadap kecamatan sebagai pemerintah terdekat menjadi titik penting dalam aspek kehandalan atau reliability, dengan peran Kecamatan Campaka terutama terfokus pada koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) untuk penanganan lebih lanjut. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan

aparatur negara. Dalam kaitan inilah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah (Bismawati, 2016). Salah satu Upaya pencegahan kebakaran dilakukan pemerintah dengan membuat kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran (Harera & Hidayat, 2018). Dana penanggulangan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah (Syarifah, et al., 2020).

Dalam konteks daya tanggap atau responsiveness, Pemerintah Kecamatan Campaka berupaya memberikan himbauan dan membantu penanganan kebakaran, serta memastikan bahwa pemadam kebakaran dapat mencapai lokasi bencana dengan lancar. Jaminan atau assurance terlihat dalam peran BPBD Kabupaten Purwakarta dalam rekonstruksi pasca bencana, di mana Kecamatan Campaka berfungsi dalam memfasilitasi dan memberikan bantuan darurat kepada korban. Kepedulian atau empathy termanifestasi melalui bantuan yang diberikan kepada korban bencana kebakaran, yang umumnya berupa sembako dan keperluan dasar lainnya. Beberapa Upaya pencegahan kebakaran bisa dilakukan dengan sosialisasi pencegahan kebakaran, pelatihan dsar penanggulangan kebakaran (Ananda, et al., 2022). Upaya pengurangan risiko bencana diperlukan suatu cara untuk menumbuhkan budaya sadar bencana di masyarakat (Banjarnahor, et al., 2020).

Prosedur pelayanan penanggulangan bencana kebakaran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang mencakup tanggung jawab pemilik gedung dan kendaraan serta tindakan awal penyelamatan, pemadaman, dan pengamanan lokasi bencana. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran juga menjadi faktor penting, dengan inisiatif masyarakat dalam melaporkan dan membantu pemadaman kebakaran sebelum kedatangan petugas. Keterlibatan Dinas dan instansi terkait dikoordinasikan dengan baik, dan upaya penanggulangan dilakukan dengan cepat tanggap. Guna meningkatkan kinerja terdapat Upaya yang dapat dilakukan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yaitu dengan melakukan sosialisasi, peningkatan kemampuan, menciptakan ruang lingkup pemadam kebakaran, pemetaan wilayah rawan kebakaran. (Alamsyah, 2022). Program penanggulangan bencana baik itu pra dan pasca kurang diperhatikan oleh lembaga-lembaga pelayanan kebencanaan. Akibatnya dampak yang terjadi akibat bencana akan lebih berat dan sulit dalam proses rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi dari korban bencana itu sendiri (Rawe, et al., 2021).

Dalam manajemen resiko bencana, pembangunan sistem penanggulangan bencana mencakup legitimasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan peningkatan kapasitas, sementara masyarakat diajak untuk aktif dalam pencegahan, pengawasan, dan pelaporan terkait kebakaran. Namun, terdapat kekurangan dalam penyuluhan bencana kebakaran bagi masyarakat, meskipun peristiwa kebakaran sering terjadi. Pemerintah harus berperan dalam mitigasi bencana karena menyangkut keselamatan public (Heryati, 2020). Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan evaluasi secara berkala (Irawan, et al., 2023).

Faktor pendukung dalam pelayanan bencana kebakaran termasuk pembentukan BPBD Kabupaten Purwakarta dan partisipasi serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Penerapan good governance dalam mencegah terjadinya kebakaran (Rusadi & Yuslimi, 2021) (Sari, et al., 2021). Pemerintah berperan dalam Upaya pencegahan kebakaran (Chandya, 2021).

Namun, terdapat penghambat signifikan, seperti faktor alam yang menyulitkan pengendalian kebakaran di wilayah hutan dan lahan, kurangnya kesadaran masyarakat, kekurangan sarana dan prasarana, serta kurangnya penyuluhan. Rendahnya kesadaran pada risiko kebakaran dapat menjadi kendala pencegahan kebakaran (Fitri, et al., 2022). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran bisa menyebabkan terhambatnya proses penanggulangan (Sinaga, 2023). Antisipasi penanggulangan kebakaran dengan cara membentuk masyarakat peduli api, sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari bencana kebakaran lahan, kebun, dan hutan (Kamaliah, et al., 2018).

Keseluruhan temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan sumber daya, edukasi, dan infrastruktur dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kecamatan Campaka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian tentang kualitas pelayanan bencana kebakaran di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, mengungkap beberapa kelemahan kritis dan area yang memerlukan perbaikan. Pertama, kekurangan peralatan pemadam kebakaran di kecamatan menuntut masyarakat untuk mengambil tindakan awal dengan sumber daya yang terbatas. Kedua, terdapat ketergantungan yang signifikan pada kecamatan sebagai koordinator utama dengan DPKPB dalam situasi kebakaran. Meskipun pemerintah kecamatan berupaya menanggapi dengan cepat dan memberikan bantuan, masih ada kekurangan dalam hal penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kebakaran.

Partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan dukungan dari pemerintah daerah adalah aspek positif. Namun, penghambat seperti faktor alam, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kekurangan sarana dan prasarana menghadirkan tantangan serius. Penyuluhan yang tidak memadai mengurangi efektivitas pencegahan kebakaran dan kesiapan masyarakat. Untuk meningkatkan penanggulangan bencana kebakaran di Kecamatan Campaka, diperlukan peningkatan dalam penyediaan peralatan, penyuluhan masyarakat yang lebih efektif, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya. Penyempurnaan koordinasi antara kecamatan, DPKPB, dan masyarakat juga penting untuk memastikan respons yang cepat dan efisien dalam situasi darurat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, A. M. S. (2022). *Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Ananda, F. R., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2022). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 173-181.
- Andini, F. N., Anggraeny, R., & Susilowati, T. (2020). Upaya Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, 8(1), 8978-8990.
- Arifin, A. (2020). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(2), 189-208.
- Arisandi, D., Syamsuadi, A., Gafar, T. F., Hartati, S., & Anugerah, M. F. (2020). Pembinaan Masyarakat Peduli Api Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Desa Dayun Dalam Menangani Bencana Kebakaran Lahan. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 3(3), 34-37.
- Banjarnahor, J., Rahmat, H. K., & Sakti, S. K. (2020). Implementasi sinergitas lembaga pemerintah untuk mendukung budaya sadar bencana di Kota Balikpapan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 448-461.
- Bencana, B. N. P. (2018). Definisi Bencana. *Diambil pada*, 23.
- Bismawati, B. (2016). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 4(3).
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika pelayanan publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59-76.
- Chandya, T. (2021). Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ketapang. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 096-103.
- Fitri, A., Musri, M., & Syahrial, I. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 55-65.

- Harera, F. W., & Hidayat, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 386-401.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139-146.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139-146.
- Irawan, B., Sarkani, S., & Indarto, K. (2023). Mitigasi Bencana Kebakaran Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 476-483.
- Kamaliah, K., Azhari, M., & Marlina, S. (2018). Evaluasi Pencegahan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di Kab. Katingan Tahun 2016. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)*, 3(1), 1-5.
- Muthmainnah, S. (2021). Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Di Kota Langsa Provinsi Aceh.
- Nugraha, S. A., Febriyanti, D., & Kencana, N. (2020). Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2).
- Ramadan, F. (2023). *Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam" 45" Bekasi).
- Rawe, A. S., Welu, F., Tola, D., & Miten, A. O. (2021). Penyaluran bantuan bencana alam dan keterpenuhan kebutuhan korban bencana kebakaran di rumah adat desa nggela kabupaten ende flores. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 28-33.
- Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 22-34.
- Rusadi, S., & Yuslaini, N. (2021). Prinsip good environmental governance oleh pemerintah kabupaten siak (studi kasus kebakaran lahan gambut di kecamatan dayun). *Jurnal Niara*, 14(2), 135-141.
- Sari, P. Y., Soma, S., & Rohmadiani, L. D. (2021). Evaluasi Pelayanan Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran Pada Permukiman Perkotaan. *TATALOKA*, 23(2), 298-306.
- Sinaga, M. (2023). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.